

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELESTARIAN KEBUDAYAAN
DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA**

TESIS

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mendapatkan Gelar Master
Administrasi Publik Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Andalas*

OLEH
SUTAN RISKA TUANKU KERAJAAN
2120842008



Dosen Pembimbing I : Dr. Roni Ekha Putera, M.PA
Dosen Pembimbing II : Dr. Hendri Koeswara, M.Soc.sc

PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2023

ABSTRAK

Sutan Riska Tuanku Kerajaan, NIM 2120842008, Implementasi Kebijakan Pelestarian Kebudayaan Daerah Kabupaten Dharmasraya, Studi Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Padang, 2023. Dibimbing Oleh: Dr. Roni Ekha Putera, S.IP, M.PA dan Dr. Hendri Koeswara, S.Soc.sc . Tesis ini terdiri dari 128 Halaman dengan referensi 9 buku teori, 5 buku metode 14 Jurnal, 5 Skripsi/Tesis, 7 Dokumen dan 3 Website

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya memandang isu-isu strategis dan permasalahan terkait kebudayaan daerah tersebut sebagai persoalan penting yang kemudian dituangkan kedalam perencanaan pembangunan daerah dan akan menghasilkan kebijakan-kebijakan dalam mencapai tujuan pemerintah daerah. Proses yang dilalui oleh pemerintah itulah yang dinamakan sebagai implementasi kebijakan daerah. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Kebijakan Pelestarian Kebudayaan di Kabupaten Dharmasraya serta Implikasi nya terhadap *target group* (sasaran kebijakan). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teori yang digunakan adalah Model Implementasi Kebijakan Merilee S. Grindle yakni *Content Of Policy* dan *Context Of Policy*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pelestarian kebudayaan daerah Kabupaten Dharmasraya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pelestarian Adat dan Pemajuan Kebudayaan di Kabupaten Dharmasraya pada umumnya sudah berjalan dengan optimal berdasarkan indikator pada teori Merilee S. Grindle. Implikasi dari kebijakan ini juga memberikan dampak yang positif terhadap sasaran kebijakan diantaranya penguatan Lembaga Adat, peningkatan kesejahteraan Pemangku Adat dan perlindungan pada objek budaya dan peninggalan sejarah. Penelitian ini juga memiliki faktor pendukung seperti sumber daya manusia yang memadai dan dukungan berbagai pihak, sedangkan faktor penghambat tersebut adalah masih lemahnya pengawasan dan terbatasnya anggaran yang bersumber dari APBD.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Pelestarian, Kebudayaan

ABSTRACT

Sutan Riska Tuanku Kerajaan, NIM 2120842008, Implementation of Regional Cultural Preservation Policy in Dharmasraya Regency, Master of Public Administration Studies, Faculty of Social and Political Sciences, Andalas University, Padang, 2023. Supervised by: Dr. Roni Ekha Putera, S.IP, M.PA and Dr. Hendri Koeswara, S.Soc.sc . This thesis consists of 128 pages with references to 9 theory books, 5 method books, 14 journals, 5 theses, 7 documents and 3 websites.

The Dharmasraya Regency Government views strategic issues and problems related to regional culture as important issues which are then incorporated into regional development planning and will produce policies to achieve regional government goals. The process that the government goes through is called regional policy implementation. The aim of this research is to describe and analyze the implementation of the Cultural Preservation Policy in Dharmasraya Regency. This research uses qualitative methods. The theory used is Merilee S. Grindle's Policy Implementation Model, namely Content Of Policy and Context Of Policy.

The results of the research show that the implementation of regional cultural preservation policies in Dharmasraya Regency based on Regional Regulation Number 4 of 2023 concerning Traditional Preservation and Cultural Advancement in Dharmasraya Regency has generally run optimally based on indicators in Merilee S. Grindle's theory. The implications of this policy also have a positive impact on policy targets, including strengthening Traditional Institutions, increasing the welfare of Traditional Authorities and protecting cultural objects and historical heritage. This research also has supporting factors such as adequate human resources and support from various parties, while the inhibiting factors are still weak supervision and limited budget sourced from the APBD.

Keywords: Implementation, Policy, Preservation, Culture